

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengunggah sebuah laporan berjudul “*A more secure world: Our shared responsibility*”, ancaman keamanan yang dihadapi oleh seluruh negara saat ini bukanlah sekedar perang antar negara, namun juga ancaman ekonomi seperti kemiskinan, ancaman penyakit menular seperti *covid-19*, penggunaan senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi, terorisme, dan kejahatan transnasional yang terorganisir.¹ Salah satu isu keamanan yang masih relevan sampai saat ini adalah isu Taliban yang kembali menguasai Afganistan setelah mengalami puasa kekuasaan di Afganistan selama dua puluh tahun. Kondisi Afganistan pasca Taliban mengambil alih pemerintahannya menjadi salah satu isu yang mendunia dan kontroversial, yang disebabkan oleh kebijakan seorang presiden Amerika Serikat yang memutuskan untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan di pertengahan tahun 2021. Isu keamanan merupakan sebuah hal yang penting dibahas dalam ilmu Hubungan Internasional karena keamanan merupakan faktor penting bagi kesejahteraan negara dan warga negaranya.

¹ *A more secure world: Our shared responsibility*, United Nations Department of Public Information, diakses dalam https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/hlp_more_secure_world.pdf (17/10/2023, 18:36 WIB)

Pada tahun 2001, al-Qaeda menyerang Amerika Serikat, yang dikenal sebagai tragedi *nine-eleven*. Presiden George W. Bush mengeluarkan sebuah kebijakan bernama *Global War on Terrorism* (GWOT) sebagai wujud upaya Amerika Serikat untuk menjaga keamanan internasional dari ancaman teroris. Arsip Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan bahwa GWOT merupakan sebuah upaya operasi Amerika Serikat untuk menghancurkan jaringan terorisme khususnya al-Qaeda di Afganistan dan membebaskan masyarakat Afganistan dari kepemimpinan Taliban.² Amerika Serikat mulai melakukan invasi terhadap Afganistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak untuk menyerahkan Osama bin Laden, ketua al-Qaeda yang berada di Afganistan pada saat itu. Invasi Amerika Serikat tersebut berhasil mengusir Taliban dari Afganistan.³

Setelah masa kepresidenan George W. Bush berakhir, Barack Obama naik menggantikan peran Bush sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2009. Pada masa kepresidenan Barack Obama, Amerika Serikat sempat memutuskan untuk keluar dan menarik pasukan militer dari Afganistan. Salah satu objektif Amerika Serikat di Afganistan adalah untuk membunuh Osama bin Laden, sebagai pemimpin al-Qaeda, telah terpenuhi pada 2 Mei 2011.⁴ Kematian Osama bin Laden membuat Presiden Barack Obama menyatakan bahwa akan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari

² *The Global War on Terrorism: The First 100 Days*, U.S. Department of State, diakses dalam <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm> (20/10/2023, 02.52 WIB)

³ Ashgor, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁴ Macon Phillips, *Osama Bin Laden Dead*, The White House President Barack Obama, diakses dalam <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/05/02/osama-bin-laden-dead> (2/10/2023, 02:12 WIB)

Afganistan pada tahun 2014, menyisakan beberapa pasukan untuk melatih *Afghan National Army* (ANA) dan *Afghan National Police* (ANP).

Namun, masih terdapat banyak kompleksitas masalah yang menghantui Afganistan, terutama masalah keamanan yang Amerika Serikat anggap belum stabil karena gerakan Taliban masih sering dijumpai di Afganistan. Alhasil, Presiden Barack Obama membatalkan rencananya untuk menarik mundur pasukan militer dari Afganistan.⁵ Masa jabatan kepresidenan Barack Obama bertahan selama dua periode, sampai akhirnya diganti jabatannya oleh Presiden Donald Trump pada 20 Januari, 2017. Di tahun yang sama, Presiden Donald Trump telah mengirimkan 4.000 personil tentara tambahan ke Afganistan untuk menjaga stabilitas keamanan di Afganistan setelah Taliban menyuarkan Operasi Mansouri yang bertujuan untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan asing. Kekhawatiran Amerika Serikat akan kekuatan Taliban yang berpotensi untuk menjadi semakin kuat terbukti dengan keberhasilan Taliban mengambil alih distrik penting di Afganistan.⁶

Presiden Donald Trump berupaya untuk menyudahi kedudukan Amerika Serikat di Afganistan, mempertimbangkan anggaran dana negara yang telah habis dimakan oleh perang dan kondisi pasukan militer Amerika Serikat yang telah menduduki Afganistan selama kurang lebih 18 tahun. Pemerintahan Amerika Serikat

⁵ Marteen Gregory Tampenawas, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Penarikan Mundur Pasukan Tempur dari Republik Islam Afghanistan pada Masa Presiden Barack Obama Tahun 2011-2014*, Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, hal. 6.

⁶ ST. Atiyah Suci Adinda Millennia, *Kebijakan Amerika Serikat dalam Penarikan Pasukan Militer dari Afghanistan pada Tahun 2021*, Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 3.

akhirnya membuat sebuah komitmen dengan Taliban untuk membicarakan aksi damai.⁷ Pada Februari 2020, sebuah perjanjian perdamaian dilakukan di Doha, Qatar, yang terkenal dengan sebutan *The Doha Peace Agreement 2020*.

Satu tahun setelah ditandatanganinya *The Doha Agreement*, perundingan antara Taliban dengan Intra-Afganistan tidak membuahkan hasil, bahkan gagal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kejahatan yang semakin meningkat di Afganistan. Menurut sebuah laporan dari PBB yang dipublikasikan pada 23 Februari 2021, korban kejahatan meningkat sebanyak 45%, tercatat setelah negosiasi Taliban-Afganistan dimulai pada September 2020. Dapat disimpulkan bahwa Taliban semakin berani dan liar setelah pengumuman kepergian pasukan militer Amerika Serikat dalam *The Doha Agreement*.⁸

Presiden Joe Biden dilantik pada tanggal 20 Januari 2021, menggantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Beliau menganggap keputusan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan merupakan keputusan yang benar untuk menghentikan perang yang telah melampaui batas objektif yang awalnya untuk menghukum Taliban karena melindungi al-Qaeda sejak terjadinya peristiwa *nine-eleven*. Presiden Joe Biden akan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan pada April 2021 dan sampai pada akhir Juli 2021, dengan hanya menyisakan beberapa personel tentara untuk melindungi kedutaan Amerika Serikat di

⁷ Erwin Syam, *Transformasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump terhadap Taliban dengan Pendekatan Model Two-Level Games*, Skripsi. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, hal. 2.

⁸ *US-Taliban Doha Agreement: One-Year Review*, Constellis, diakses dalam <https://www.constellis.com/wp-content/uploads/2021/03/CONSTELLIS-US-Taliban-Doha-Agreement-Situation-Report-March-2021.pdf> (06/10/2023, 14:56 WIB)

Kabul. Seiring berjalannya waktu, ketika Amerika Serikat menarik pasukannya militernya, Taliban mulai merebut teritorial Afghanistan dari pemerintahan resmi Afghanistan di bawah komando Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Sebelum memasuki ibu kota, Taliban telah melancarkan serangan terhadap kota-kota besar, seperti Mazari-Sharif dan Jalalabad.

Pada 15 Agustus 2021, Taliban berhasil menembus tembok pertahanan Afghanistan di Ibukota Kabul, menyebabkan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan. Peristiwa itu menandakan awal dari pengambilan alih Taliban di Afghanistan setelah kurang lebih 20 tahun kehilangan kontrol atas pemerintahan Afghanistan.⁹ Meskipun pasukan militer Amerika Serikat telah ditarik dari Afghanistan, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa operasi kontraterorisme akan tetap berlanjut dan akan melakukan asesmen terhadap realisasi perjanjian perdamaian yang dicapai antara Amerika Serikat dan Taliban, serta asesmen terhadap intensitas serangan Taliban di Afghanistan.¹⁰

Penelitian ini hadir untuk meneliti komparasi faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dengan Joe Biden di Afghanistan. Presiden Donald Trump membuat sebuah perjanjian bernama *The Doha Peace Agreement* pada tahun 2020 dengan serangkaian poin perdamaian, termasuk kontinual

⁹ Kaiva Azria dan Erma Ramayani, *Sejarah Perang Afghanistan dari Dulu hingga Kini*, Jurnal PIR, Vol. 6, No. 2 (2022), Palembang: Universitas Sriwijaya, hal. 132.

¹⁰ Muhammad Arif Ikhsanudin, *The Dynamic of the United States Political Elites Construction on Taliban in Afghanistan. Case Study of the US Presidents' Thoughts on Terrorism Policies, from President Josh W. Bush to President Joe Biden (2001-2021)*, Formosa Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1 (2023), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 49.

penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan gencata senjata permanen bagi pasukan militer Amerika Serikat, Taliban, dan pemerintahan interim Afganistan di bawah pimpinan Presiden Ashraf Ghani. Namun, alih-alih melakukan gencata senjata, angka kejahatan dan kekerasan di Afganistan justru melambung naik. Didalangi oleh Taliban, mereka justru lebih tampil berani, menunjukkan keinginannya untuk menguasai kembali Afganistan dengan cara menguasai dan merebut beberapa kota strategis sejak pengumuman penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan.

Selanjutnya, analisa mengenai komparasi faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan akan dijelaskan lebih lanjut melalui penulisan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan lebih luas terhadap isu terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan faktor-faktor penarikan pasukan militer Amerika Serikat pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis akan merumuskan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konteks internasional, kondisi politik domestik, dan kapabilitas ekonomi dan militer dari kedua presiden yang menjadi faktor penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan, dan

- b. Untuk mengetahui komparasi faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru terhadap para pembaca dan dapat menjadi inspirasi untuk penelitian baru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca untuk memperluas pengetahuan terhadap komparasi faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan.

1.5 Penelitian Terhadulu

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Untuk menegaskan orisinalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk ditinjau kembali.

1.5.1 Hubungan Amerika Serikat dengan Afganistan Bersama Taliban

Penelitian pertama adalah jurnal dari **Kaiva Azria** dan **Erma Ramayani**, berjudul **Sejarah Perang Afghanistan dari Dulu hingga Kini**.¹¹ Penelitian ini menjelaskan tentang sebab dan akibat dari perang yang selama ini terjadi di Afganistan. Intervensi Amerika Serikat di Afganistan bermula dari tragedi *nine-eleven* yang dilakukan oleh Osama bin Laden, ketua dari sebuah organisasi ekstrimis Islam transnasional yang dikenal dengan sebutan al-Qaeda. Al-Qaeda sendiri dianggap Amerika Serikat sebagai organisasi teroris yang harus dimusnahkan, terbukti dengan masuknya Amerika Serikat ke Afganistan untuk meredakan eksistensi Taliban dan membantu Afganistan untuk membuat sebuah pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pengambilan data *library research*. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis realisme untuk mendiskusikan sejarah perang antara Amerika Serikat dengan Afganistan. Menurut Thomas Hobbes, egois merupakan sifat alami yang dimiliki oleh manusia. Hal tersebut disangkutkan dengan Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat tampil sebagai negara *superpower*. Ketika gedung WTC dihancurkan oleh dua pesawat yang dibajak oleh al-Qaeda, Presiden Bush menyatakan perang terhadap al-Qaeda dan berdampak kepada Afganistan karena Taliban digadang menyembunyikan Osama bin Laden.

Hingga akhirnya pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai melakukan negosiasi dengan Taliban untuk melakukan gencatan senjata. Sayangnya, perjanjian tersebut

¹¹ Kaiva Azria dan Erma Ramayani, *Sejarah Perang Afghanistan dari Dulu hingga Kini*. Jurnal PIR, Vol. 6, No. 2 (2022), Palembang: Universitas Sriwijaya.

tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Presiden Biden menyudahi perang dua dasawarsa ini dengan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan. Di tahun yang sama, Taliban kembali menguasai provinsi-provinsi besar di Afganistan dan akhirnya menguasai pemerintahan Afganistan sampai sekarang.

Penelitian kedua adalah jurnal dari **Hamish Nixon** dan **Richard Ponzio**, dengan judul **Building Democracy in Afghanistan: The Statebuilding Agenda and International Engagement**.¹² Dalam jurnal ini penulis mendapatkan pengetahuan seputar proses demokratisasi dan pendirian pemerintahan Afganistan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengumumkan keinginannya untuk membantu PBB dalam misi transisi politik program rekonstruksi pemerintahan di Afganistan. Amerika Serikat beserta PBB bersedia untuk memberikan bantuan politik dan finansial kepada Afganistan agar tidak menjadi negara yang gagal, namun Amerika Serikat harus membentuk sebuah rezim suksesor untuk menggantikan Taliban dan menguraikan proses awal stabilisasi politik Afganistan.

Bonn Agreement ditandatangani pada 5 Desember 2001, menandakan awal mula terbentuknya instansi permanen pemerintah Afganistan. Perjanjian ini merupakan kali kedua Afganistan untuk melakukan proses demokratisasi setelah percobaan pertamanya yang gagal pada tahun 1960-an. Kesuksesan *Bonn Agreement* dapat dilihat

¹² Hamish Nixon dan Richard Ponzio, *Building Democracy in Afghanistan: The Statebuilding Agenda and International Engagement*, International Peacekeeping, Vol. 14, No. 1 (2007), London: Routledge Taylor & Francis Group.

dari terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden Afganistan pada Oktober 2004 di pemilihan umum, serta ditulisnya konstitusi negara yang baru. Disusul dengan terbentuknya badan parlemen dan dewan provinsi yang baru pada September 2005 dan terbentuknya *Afghanistan Compact and the Interim-Afghanistan National Development Strategy (I-ANDS)* pada Januari 2006 untuk memperbarui negosiasi relasi antara pihak internasional dan pemerintahan Afganistan untuk mendorong stabilitas politik di Afganistan.

1.5.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Taliban

Penelitian ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh **Erwin Syam** dengan judul **Transformasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump terhadap Taliban dengan Pendekatan Model Two-Level Games**.¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dibuat oleh Presiden Donald Trump terhadap Taliban yang ingin mengakhiri perang antara Amerika Serikat dengan Taliban di Afganistan. Setelah kurang lebih dua dekade kedudukan Amerika Serikat di Afganistan dan setelah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk berperang, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa saatnya menarik pasukan militer Amerika Serikat kembali ke negaranya dan menciptakan perdamaian di Afganistan.

¹³ Erwin Syam, 2021, *Transformasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump terhadap Taliban dengan Pendekatan Model Two-Level Games*, Skripsi. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

Perjanjian damai direalisasikan oleh Amerika Serikat melalui *The Doha Peace Agreement* pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengakhiri perang dengan cara menyepakati larangan bagi al-Qaeda atau organisasi Islam ekstrimis lainnya untuk beroperasi di Afganistan. Selain itu, perjanjian yang dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat Zalmay Khalilzad sebagai perwakilan Amerika Serikat dan salah satu pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar ini juga menghasilkan komitmen Amerika Serikat untuk menarik pasukan militernya beserta NATO dari Afganistan.

Skripsi ini meneliti transformasi kebijakan politik Presiden Donald Trump menggunakan pendekatan model *two-level games* yang digagas oleh Robert D. Putnam. Terdapat dua level analisa, yaitu level internasional dan level domestik negara.

Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh **ST. Atiyah Suci Adinda Milennia**, dengan judul **Kebijakan Amerika Serikat dalam Penarikan Pasukan Militer dari Afghanistan pada Tahun 2021**.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat di bawah kepresidenan Joe Biden yang menarik seluruh pasukan militer Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 2021. Skripsi ini menjabarkan analisa kebijakan Amerika Serikat dalam penarikan pasukan militer di Afganistan pada tahun 2021 menggunakan *rational actor model* yang diperkenalkan oleh Graham T. Allison.

¹⁴ ST. Atiyah Suci Adinda Milennia, 2022, *Kebijakan Amerika Serikat dalam Penarikan Pasukan Militer dari Afghanistan pada Tahun 2021*, Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini juga menjabarkan kalkulasi untung rugi Amerika Serikat dalam kebijakan penarikan pasukan militer dari Afganistan pada tahun 2021. Kalkulasi untung rugi di skripsi ini memiliki dua pilihan, yaitu menerapkan kebijakan penarikan pasukan militer atau tidak menerapkannya. Keuntungan Amerika Serikat ketika menerapkan kebijakan penarikan pasukannya adalah relokasi anggaran perang, mengurangi ancaman krisis personal militer Amerika Serikat, dan mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di Asia. Sedangkan kerugiannya adalah merusak kredibilitas Amerika Serikat sebagai polisi dunia karena telah meninggalkan Afganistan yang konotasinya adalah sarang berkembangnya organisasi Islam konservatif Taliban dan terancamnya kepentingan Amerika Serikat dalam mengontrol geopolitik Afganistan.

Penelitian kelima adalah skripsi yang ditulis oleh **Maarten Gregory Tampenawas**, dengan judul **Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Penarikan Mundur Pasukan Tempur dari Republik Islam Afghanistan pada Masa Presiden Barack Obama tahun 2011-2014**.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang dilema kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah masa kepresidenan Barack Obama dari tahun 2009 sampai 2014 dengan menggunakan teori *rational actor model*.

Presiden Barack Obama menganggap bahwa tugas Amerika Serikat di Afghanistan telah selesai di tahun 2011, karena objektif awal dari kedatangan Amerika Serikat di Afghanistan adalah untuk mengeliminasi Osama bin Laden sebagai dalang

¹⁵ Maarten Gregory Tampenawas, 2018, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Penarikan Mundur Pasukan Tempur dari Republik Islam Afghanistan pada Masa Presiden Barack Obama Tahun 2011-2014*, Skripsi. Bandung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

dari terjadinya tragedi *nine-eleven*. Sehingga pada tahun 2014, Presiden Barack Obama mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Hanya ada beberapa tenaga militer yang tersisa untuk melatih *Afghan National Army* (ANA) dan *Afghan National Police* (ANP).

Selama berada di Afghanistan, Amerika Serikat telah membantu proses demokratisasi Afghanistan dengan cara membantupembentukan pemerintahan Afghanistan. Namun, terdapat kendala di dalam internal pemerintahan Afghanistan, yaitu korupsi. Akibat dari korupsi di dalam internal pemerintahan Afghanistan, ANA dan ANP tidak dapat bekerja secara maksimal, karena minimnya dana untuk persenjataan dan bahan bakar. Kondisi tersebut membuat Amerika Serikat khawatir akan serangan dari Taliban karena pemerintahan Afghanistan sedang dalam kondisi yang rapuh, ditambah lagi dengan hilangnya kepercayaan masyarakat Afghanistan terhadap pemerintahan Afghanistan dan justru masyarakat Afghanistan mulai menerima Taliban sebagai penguasa.

Dilema politik dan keamanan yang terjadi di Afghanistan membuat seorang Presiden Barack Obama menentukan arah yang benar untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan meskipun kondisi di Afghanistan sendiri belum stabil dari ancaman Taliban.

Penelitian keenam adalah jurnal yang ditulis oleh **Muhammad Arif Ikhsanudin**, dengan judul **The Dynamic of the United States Political Elites Construction on Taliban in Afghanistan. Case Study of the Us Presidents' Thoughts on Terrorism Policies, from President George W. Bush to President**

Joe Biden (2001-2021).¹⁶ Jurnal ini membahas tentang dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap terorisme, mulai dari masa kepresidenan George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, hingga Joe Biden.

Jurnal ini meneliti dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap terorisme mulai dari Presiden George W. Bush hingga Joe Biden menggunakan teori konstruktivis. Konstruktivis menekankan analisis pada peran ide, pemikiran, keyakinan aktor lembaga dalam dan luar negeri, serta bagaimana ide dan pemikiran mengenai kebijakan para pemimpin negara tersebut dibentuk menjadi identitas baru yang mempengaruhi pembuatan kebijakan negara.

Strategi Presiden Donald Trump dalam menghadapi isu terorisme memiliki pandangan yang berbeda dari George W. Bush dan Barack Obama. Presiden Donald Trump menganggap bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap terorisme merupakan sebuah kegagalan setelah melakukan evaluasi terhadap kegagalan kebijakan anti-terorisme milik Presiden George W. Bush dan Barack Obama. Dengan membawa konsep “*America First*”, Presiden Donald Trump mengedepankan kesejahteraan dan keamanan warga negara Amerika Serikat. Konsep “*America First*” juga diterapkan oleh Presiden Donald Trump ketika dia menginisiasi *The Doha Peace Agreement* pada tahun 2020 untuk menyudahi perang di Afganistan.

¹⁶ Muhammad Arif Ikhsanudin, *The Dynamic of the United States Political Elites Construction on Taliban in Afghanistan. Case Study of the US Presidents' Thoughts on Terrorism Policies, from President Josh W. Bush to President Joe Biden (2001-2021)*, Formosa Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 1 (2023), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sedangkan strategi Presiden Joe Biden dapat dikatakan berbeda jauh dengan strategi Presiden Donald Trump. Presiden Joe Biden mengganti jargon Amerika Serikat dari “*America First*” menjadi “*America is back*”. Berangkat dari *Democratic Party*, Presiden Joe Biden justru memperbolehkan komunitas Islam di Amerika Serikat dan membatalkan *Muslim Ban* yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Namun, Presiden Joe Biden tetap akan melakukan perlawanan terhadap teroris yang mengancam Amerika Serikat dengan membuat sebuah strategi bernama *National Strategy for Overcoming Domestic Terrorism* yang bertujuan untuk mempertajam analisa pemerintahan terhadap terorisme domestik bersama agensi penegak hukum di segala level.

1.5.3 Analisa Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ketujuh adalah skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Syaiful Bahri**, dengan judul **Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Isu Nuklir Iran pada Era Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump (2009-2019)**.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang dinamika hubungan politik antara Amerika Serikat dengan Iran terkait isu nuklir Iran. Awal mula perkembangan teknologi nuklir di Iran ini, Amerika Serikat turut membantunya pada tahun 1957 melalui program *Atom for Peace* untuk memenuhi kebutuhan energi dan meningkatkan sektor ekonomi Iran. Namun, setiap pemimpin negara pasti memiliki

¹⁷ Muhammad Syaiful Bahri, 2020, *Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Isu Nuklir Iran pada Era Pemerintahan Barrack Obama dan Donald Trump (2009-2019)*, Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

gagasannya masing-masing yang membuat program tersebut berjalan secara tidak stabil.

Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat menandakan awal mula kembalinya hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Iran, khususnya pada bidang nuklir. Pada Juni 2013, Hassan Rouhani terpilih menjadi pemimpin Iran. Hassan Rouhani terkenal sebagai pemimpin yang moderat dan terbuka pada pihak barat. Melihat peluang tersebut, Presiden Barack Obama langsung membuka perundingan dengan Hassan Rouhani dengan menandatangani *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) di Wina, Austria bersama dengan lima negara lainnya, yaitu Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Tiongkok.

Setelah Barack Obama, Donald Trump menggantikan posisinya sebagai presiden Amerika Serikat. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, dia menerapkan banyak perubahan kebijakan terhadap Iran, salah satunya dengan keluar dari kesepakatan JCPOA dan menerapkan kembali sanksi ekonomi atau embargo kepada Iran yang dikenal dengan "*Maximum Pressure Campaign*" kepada Iran agar Amerika Serikat dapat menangkal kekuatan Iran. Penelitian ini hadir untuk meneliti kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump terhadap Iran dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin.

Penelitian kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh **Vivi Ida Fajarini** dan **Muhammad Zahrul Anam** dengan judul **Turkey Involvement in Libyan Civil War**

Under the Government of Recep Tayyip Erdogan 2019-2020.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang keterlibatan Turki terhadap perang saudara di Libya, yang dimulai dari pengiriman bantuan militer Turki terhadap *Government of National Accord* (GNA) pada Mei 2019 di Tripoli. Alasan utama Turki mendukung GNA adalah karena GNA merupakan pemerintahan yang dianggap resmi oleh PBB di Libya. Kontribusi Turki dalam membantu GNA berhasil mengusir *Libyan National Army* (LNA) dibawah komando Khalifa Haftar dari Tripoli, pangkalan udara Al Watiya, dan Kota Tarhuna. Keberhasilan ini menandakan awal mula keterlibatan Turki dalam perang saudara Libya.

Penelitian ini menyatakan bahwa dalam keadaan politik domestik Turki, terdapat campur tangan dari AKP atau *Justice and Development Party*, sebuah partai besar di Turki yang mengusung Erdogan sebagai presiden Turki. AKP memiliki kekuatan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Turki mulai dari tahun 2002, yang mana sejak itu Turki memberlakukan *Strategic Depth Doctrine*, strategi yang lebih dikenal dengan gerakan Neo-Ottomanisme. Turki memiliki misi untuk menjadi aktor influen di Timur Tengah dengan memanfaatkan aset geopolitik. Selanjutnya, penelitian ini menelaah proses penentuan kebijakan luar negeri Turki terhadap intervensi di Libya dengan menggunakan teori dari William D. Coplin.

¹⁸ Vivi Ida Fajarini dan Muhammad Zahrul Anam, *Turkey Involvement in Libyan Civil War Under the Government of Recep Tayyip Erdogan 2019-2020*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 209 (2022), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	Kaiva Azria dan Erma Ramayani, berjudul Sejarah Perang Afghanistan dari Dulu hingga Kini	Deskriptif Pendekatan: Realisme	Penyebab dan akibat dari perang yang terjadi di Afghanistan adalah intervensi Amerika Serikat di Afghanistan yang bermula dari tragedi <i>nine-eleven</i> yang dilakukan oleh Osama bin Laden, pimpinan organisasi ekstremis Islam transnasional yang dikenal dengan nama al-Qaeda. Dan akhirnya, Taliban kembali menguasai Afganistan setelah kurang lebih 20 tahun kehilangan kendali.
2.	Hamish Nixon dan Richard Ponzio, dengan judul <i>Building Democracy in</i>	Deskriptif Pendekatan:	Proses demokratisasi di Afganistan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dimulai dengan adanya <i>Bonn Agreement</i> . Hamid

	<p><i>Afghanistan: The Statebuilding Agenda and International Engagement</i></p>		<p>Karzai terpilih menjadi presiden Afganistan setelah Amerika Serikat melibatkan diri ke dalam pemerintahan Afganistan, membentuk sebuah rezim untuk melampaui Taliban. Setelah pemerintahan intra-Afganistan terbentuk, terdapat permasalahan internal yang dihadapi oleh intra-Afganistan, yaitu perselisihan kubu pro dan anti Karzai, korupsi dan perbedaan etnis di Afganistan.</p>
<p>3.</p>	<p>Erwin Syam, dengan judul Transformasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump terhadap Taliban dengan Pendekatan Model <i>Two-Level Games</i></p>	<p>Deskriptif</p> <p>Pendekatan: <i>Two-Level Games</i></p>	<p>Awal mula terbentuknya <i>peace process</i> yang dilakukan oleh Amerika Serikat di bawah kepresidenan Donald Trump dibuktikan dengan ditandatanganinya <i>The Doha Peace Agreement 2020</i>. Terdapat beberapa poin dari <i>The</i></p>

			<i>Doha Peace Agreement 2020</i> , salah satunya adalah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan NATO dari Afganistan.
4.	ST. Atiyah Suci Adinda Millennia, dengan judul Kebijakan Amerika Serikat dalam Penarikan Pasukan Militer dari Afghanistan pada Tahun 2021	Deskriptif Pendekatan: <i>Rational Actor Model</i>	Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat menggantikan Presiden Donald Trump membuat Amerika Serikat melanjutkan rencananya untuk menarik pasukan militernya dari Afganistan. Teori <i>rational actor model</i> digunakan untuk mengelaborasi keputusan Presiden Joe Biden terhadap penarikan militer Amerika Serikat dari Afganistan.
5.	Maarten Gregory Tampenawas, dengan judul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat	Kualitatif Pendekatan:	Dilema politik domestik era kepresidenan Barack Obama terhadap Taliban di Afganistan memicu penarikan militer

	dalam Penarikan Mundur Pasukan Tempur dari Republik Islam Afghanistan pada Masa Presiden Barack Obama Tahun 2011-2014	<i>Rational Actor Model</i>	Amerika Serikat dari Afganistan. Presiden Barack Obama menilai bahwa objektif Amerika Serikat telah selesai, yaitu mengeliminasi Osama bin Laden selaku dalang dibalik terjadinya tragedi <i>nine-eleven</i> .
6.	Muhammad Arif Ikhsanudin, dengan judul <i>The Dynamic of the United States Political Elites Construction on Taliban in Afghanistan. Case Study of the Us Presidents' Thoughts on Terrorism Policies, from President Josh W. Bush to President Joe Biden (2001-2021)</i>	Deskriptif Pendekatan: Konstruktivisme	Dinamika politik dalam Amerika Serikat terus berjalan, terutama saat Amerika Serikat dipimpin oleh presiden baru. Setiap presiden memiliki kebijakan luar negerinya masing-masing, terutama kebijakan terhadap terorisme. Melihat kebijakan yang diberikan oleh Presiden Donald Trump dan Joe Biden, terdapat perbedaan signifikan pada kebijakannya, terutama tekanan dari politik domestik, seperti

			partai pengusung dan pribadi dari presiden itu sendiri.
7.	Muhammad Syaiful Bahri, dengan judul Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Isu Nuklir Iran pada Era Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump (2009-2019).	<p>Eksplanatif</p> <p>Pendekatan: <i>Foreign Policy Making Theory</i> (William D. Coplin)</p>	<p>Perbedaan signifikan terdapat pada kebijakan Presiden Barack Obama dan Donald Trump terhadap isu nuklir di Iran. Presiden Barack Obama membuat sebuah kesepakatan JCPOA, untuk mengendalikan nuklir Iran dengan timbal balik pengangkatan embargo ekonomi Iran. Dengan latar belakang partai yang berbeda, Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari JCPOA dan mengembalikan sanksi ekonomi atau embargo kepada Iran dengan kampanye “<i>Maximum Pressure Campaign</i>”.</p> <p>Penggunaan teori kebijakan luar negeri dari William D. Coplin</p>

			menentukan alasan dibalik dinamika kebijakan Amerika Serikat terhadap isu nuklir Iran.
8.	Vivi Ida Fajarini dan Muhammad Zahrul Anam, dengan judul <i>Turkey Involvement in Libyan Civil War Under the Government of Recep Tayyip Erdogan 2019-2020</i>	Deskriptif Pendekatan: <i>Foreign Policy Making Theory</i> (William D. Coplin)	Keterlibatan Turki dalam perang saudara Libya dilatarbelakangi oleh kepentingan Turki untuk merebut kembali cadangan energi di Mediterania Timur, tepatnya melakukan blokade terhadap rute pipa bawah tanah EastMed dengan mengatur batas laut Libya dan Turki. Stabilitas ekonomi dan militer juga menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan Turki untuk terlibat dalam perang saudara Libya.

Delapan penelitian terdahulu ini menjadi pondasi literatur pendukung untuk mengerjakan penelitian ini. Penelitian yang ditulis oleh Kaiva Azria dan Erna Ramayani (2022) menganalisis latar belakang intervensi Amerika Serikat di Afganistan

sampai upaya Amerika Serikat melakukan gencatan senjata dengan Taliban. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh Hamish Nixon dan Richard Ponzio (2007) menganalisis tentang strategi Amerika Serikat membangun demokrasi dan stabilitas politik di Afghanistan. Kedua penelitian ini telah menganalisis motif intervensi Amerika Serikat di Afghanistan, namun belum disebutkan rasionalisasi Amerika Serikat terhadap penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan.

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Erwin Syam (2021) menganalisis tentang kebijakan Donald Trump terhadap Taliban dengan menggunakan pendekatan model *two-level*. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh ST. Atiyah Suci A. M. (2022) menganalisis kebijakan Amerika Serikat dalam menarik pasukan militernya dari Afghanistan yang dilaksanakan oleh Joe Biden. Kedua penelitian tersebut menganalisis dua kebijakan dari dua presiden Amerika Serikat yang berbeda. Penelitian ini hadir untuk membandingkan kebijakan dari Donald Trump dengan Joe Biden untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan.

Penelitian yang ditulis oleh Maarten Gregory T. (2018) ini menganalisis tentang kebijakan Barack Obama di tahun 2011 untuk menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan karena Presiden Obama menilai objektif Amerika Serikat telah selesai, meskipun dilema politik dan keamanan di Afghanistan masih belum stabil. Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh M. Arif Ikhsanudin (2023) ini menganalisis masing-masing kebijakan presiden Amerika Serikat terhadap Taliban dari era Presiden Bush sampai Presiden Biden. Dua penelitian tersebut sama-sama menganalisis

kebijakan Amerika Serikat untuk menarik pasukan militernya dari Afganistan, namun tidak disertai dengan komparasi kebijakan.

Faktor lain yang dapat dijadikan acuan untuk meneliti proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, serta konteks internasional yang dikaji dari penelitian yang ditulis oleh M. Syaiful Bahri (2020) dan Vivi Ida Fajarini dan M. Zahrul Anam (2022). Dari perbedaan dua penelitian, peneliti ingin membandingkan kebijakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden di Afganistan dengan menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin.

1.6 Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian membutuhkan teori atau konsep yang relevan untuk menganalisa sebuah fenomena. Penelitian dengan judul “Analisa Komparatif Faktor-Faktor Penarikan Pasukan Militer pada Masa Kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan” ini dikaji menggunakan teori kebijakan luar negeri.

1.6.1 Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri

Untuk menjelaskan dan memprediksi kebijakan luar negeri suatu negara yang dilakukan oleh manusia, ilmu hubungan internasional telah mengembangkan perspektif teoritis, yaitu analisis kebijakan luar negeri atau *foreign policy analysis* (FPA). Dengan adanya *foreign policy analysis*, sebuah kebijakan luar negeri dapat diteliti sebab-akibatnya dan proses keputusan itu dibentuk. Teori ini berasumsi bahwa

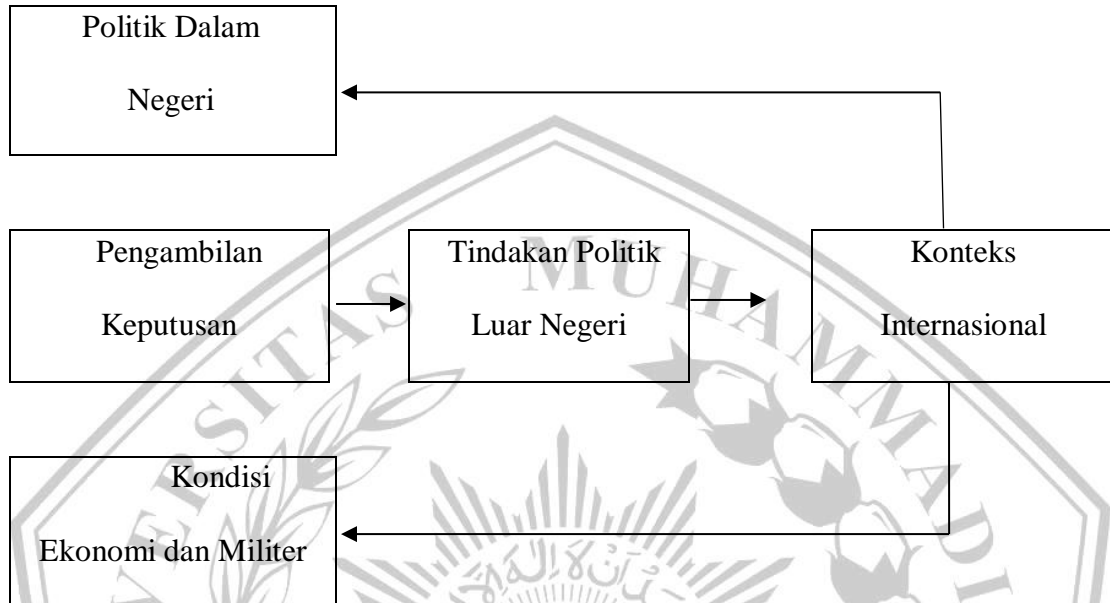
sumber dari dinamika politik internasional terjadi karena perilaku manusia, secara individu maupun kolektif.¹⁹

Kebijakan luar negeri seringkali dipelajari dengan berfokus pada satu negara atau dengan melakukan penelitian antar negara atau lintas waktu. Terdapat beberapa faktor yang bisa dijadikan sebagai objek komparasi sebuah kebijakan luar negeri, seperti jenis rezim yang menjadi musuh, kondisi dalam negeri, persenjataan, dan lain-lain. Menurut teori dari William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoretis Edisi Kedua, terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, yaitu keadaan politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, dan peranan konteks internasional.²⁰ Berikut adalah gambar empat determinan yang mempengaruhi Tindakan politik luar negeri menurut William D. Coplin:

¹⁹ Valerie M. Hudson dan Christopher S. Vore, *Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow*, Mershon International Studies Review, Vol. 39, No. 2 (1995), Utah: Brigham Young University, hal. 210.

²⁰ William D. Coplin dan Marsedes Marbun, 2003, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*, Edisi Kedua, Bandung: Sinar Baru, hal. 30.

Gambar 1.1 Faktor Determinan *Foreign Policy Analysis*



Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*, Edisi Kedua, Bandung: Sinar Baru, hal. 30.

Situasi politik domestik dalam sebuah negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Aktor politik dalam negeri memiliki pengaruh terhadap perilaku politik luar negeri sebuah negara, hal tersebut disebut dengan *policy influence system* (sistem pengaruh kebijakan). Sebuah pemerintahan membutuhkan sosok *policy influencers* yang merupakan sumber dukungan bagi rezim sebuah pemerintahan. Para pemimpin banyak bergantung kepada dukungan masyarakatnya, seperti dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan besar, kesetiaan angkatan bersenjata, suara dalam pemilu, dan lain-lain.

Dalam menganalisis *policy influence system*, terdapat dua konsep yang memberikan kerangka dasar untuk menganalisis peran politik dalam negeri terhadap tindakan politik luar negeri sebuah negara. Konsep pertama adalah konsep sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup. Menurut R. Barry Farrel, sistem politik terbuka merupakan sinonim dari negara demokrasi konstitusional. Negara-negara dengan sistem politik terbuka memiliki ciri-ciri adanya pemilihan umum, negara dengan multipartai, dan adanya kesepakatan terhadap aturan konstitusional bagi penguasa pemerintahan, layaknya Amerika Serikat. Sedangkan, sistem politik tertutup memiliki ciri-ciri adanya sebuah ideologi resmi, negara dengan satu partai unggul dan menguasai, penguasaan partai pada seluruh rana komunikasi massa yang efektif.

Konsep kedua adalah empat kategori *policy influencers* yang mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Gabriel Almond: “Elit politik yang meliputi para pejabat terpilih serta para anggota partai, elit administratif, atau elit birokratis, elit kepentingan, serta elit komunikasi”.²¹ Selanjutnya, William D. Coplin membagi *policy influencers* ke dalam empat kategori, yaitu:

1. *Bureaucratic influencers*: individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintahan yang membantu pengambilan keputusan, penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan,

2. *Partisan influencers*: partai politik menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

²¹ Gabriel A. Almond, 1962, *The American People and Foreign Policy*, New York: Prager Inc., hal. 139-140.

3. *Interest influencers*: sekelompok orang yang bergabung bersama dengan kepentingan yang sama. Kebanyakan dari *influence* ini merupakan kelompok yang tidak sedominan atau sekuat partai namun dapat mendukung pembuatan kebijakan luar negeri. Kepentingan dari *interest influencers* ini dapat bersifat ekonomis maupun non-ekonomis.

4. *Mass influencers*: komunikasi masif yang dapat menggiring opini publik, sehingga menjadi pertimbangan oleh pemerintah saat menyusun politik luar negeri.

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian ini, Presiden Donald Trump yang dipilih menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat merupakan perwakilan dari *Grand Old Party* (GOP) atau yang biasa dikenal sebagai *Republican Party*. Sedangkan Presiden Joe Biden yang dipilih menjadi presiden ke-46 Amerika Serikat merupakan perwakilan dari *Democratic Party*. Dua partai besar di Amerika Serikat ini tentu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Kapabilitas ekonomi dan militer menjadi poin kedua yang diutarakan oleh William D. Coplin. Menurut Coplin, kapabilitas ekonomi dan militer menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Dari kapabilitas ekonomi, sebuah negara dapat diukur perkembangan kapabilitas ekonomi dan militer yang kuat dan stabil dapat mempengaruhi suatu negara untuk lebih aktif di ranah politik internasional. Kekayaan sebuah negara dapat diukur melalui *gross national product* (GNP) dengan mengkonversikan angka-angka GNP ke dalam satu standar mata uang. GNP sendiri merupakan sebuah perkiraan nilai total seluruh produk akhir dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu oleh suatu negara. GNP biasanya dihitung

dengan menjumlahkan investasi dalam negeri, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan perolehan dari investasi luar negeri.²²

Dari segi kapabilitas militer menurut teori Coplin, terdapat tiga kriteria penilaian umum dalam menilai kekuatan militer, yaitu: jumlah pasukan, tingkat pelatihan, dan sifat perlengkapan militer. Ketika kriteria tersebut memiliki kesinambungan dengan kapabilitas ekonomi sebuah negara. Pada umumnya, semakin tinggi GNP suatu negara, semakin tinggi pula kemampuannya untuk menciptakan kekuatan militer. Selain itu, kesediaan masyarakat juga mempengaruhi kekuatan militer sebuah negara, terutama bagi para *policy influencers* yang memiliki suara dan peran penting untuk mengalihkan sumber daya ekonomi kepada pengembangan kekuatan militer.²³

Salah satu kasus yang dapat dikorelasikan dengan faktor kedua dari teori Coplin ini adalah pada tahun 2021, di tahun pertama Presiden Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, dunia dihadapkan dengan *corona virus disease-19* yang menjadi tugas dari Presiden Joe Biden untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Amerika Serikat. Tentunya, biaya vaksin dan operasi lainnya membutuhkan biaya lebih. Dilansir dari BBC, Presiden Joe Biden telah menyetujui rancangan undang-undang untuk bantuan pandemi sebesar \$1,9 triliun.²⁴ Dengan angka dana yang tinggi

²² *Gross National Product (GNP) Defined with Example*, Investopedia, diakses dalam <https://www.investopedia.com/terms/g/gnp.asp> (20/05/2024, 23:11 WIB)

²³ William D. Coplin dan Marsedes Marbun, *Loc. Cit.*, hal. 126

²⁴ Robin Levinson-King dan Mike Hills, *Joe Biden one year: How is he doing so far*, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60044270> (02/10/2023, 02:12 WIB)

untuk menangkis kejamnya pandemi, Presiden Joe Biden harus menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan untuk mengurangi biaya perang yang sudah digelontorkan untuk melawan Taliban.

Dalam konteks internasional, William D. Coplin mengungkapkan bahwa konteks internasional menjelaskan sikap suatu negara terhadap negara lain melalui tiga faktor, yaitu geografis, ekonomi, dan politik.²⁵ Jika dilihat dari faktor geografis, Afganistan merupakan sarang bagi ancaman keamanan Amerika Serikat, termasuk terorisme. Menjaga stabilitas keamanan di Afganistan menjadi kunci faktor politik bagi Amerika Serikat untuk melakukan diplomasi dengan Afganistan dengan cara membangun Afganistan yang lebih demokratik dan bebas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Taliban.²⁶

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan sebuah fenomena yang telah terjadi maupun sedang terjadi dengan mengumpulkan fakta, pemilahan fakta, dan generalisasi fakta.²⁷ Penulis berusaha untuk menggambarkan dan juga menjelaskan komparasi kebijakan masa

²⁵ Vivi Ida Fajarini dan Muhammad Zahrul Anam, *Turkey Involvement in Libyan Civil War Under the Government of Recep Tayyip Erdogan 2019-2020*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 209 (2022), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 462.

²⁶ Bureau of South and Central Asian Affairs, *U.S. Relations with Afghanistan: Bilateral Relations Fact Sheet*, U.S Department of State, diakses dalam <https://www.state.gov/u-s-relations-with-afghanistan/> (03/10/2023, 16:46 WIB)

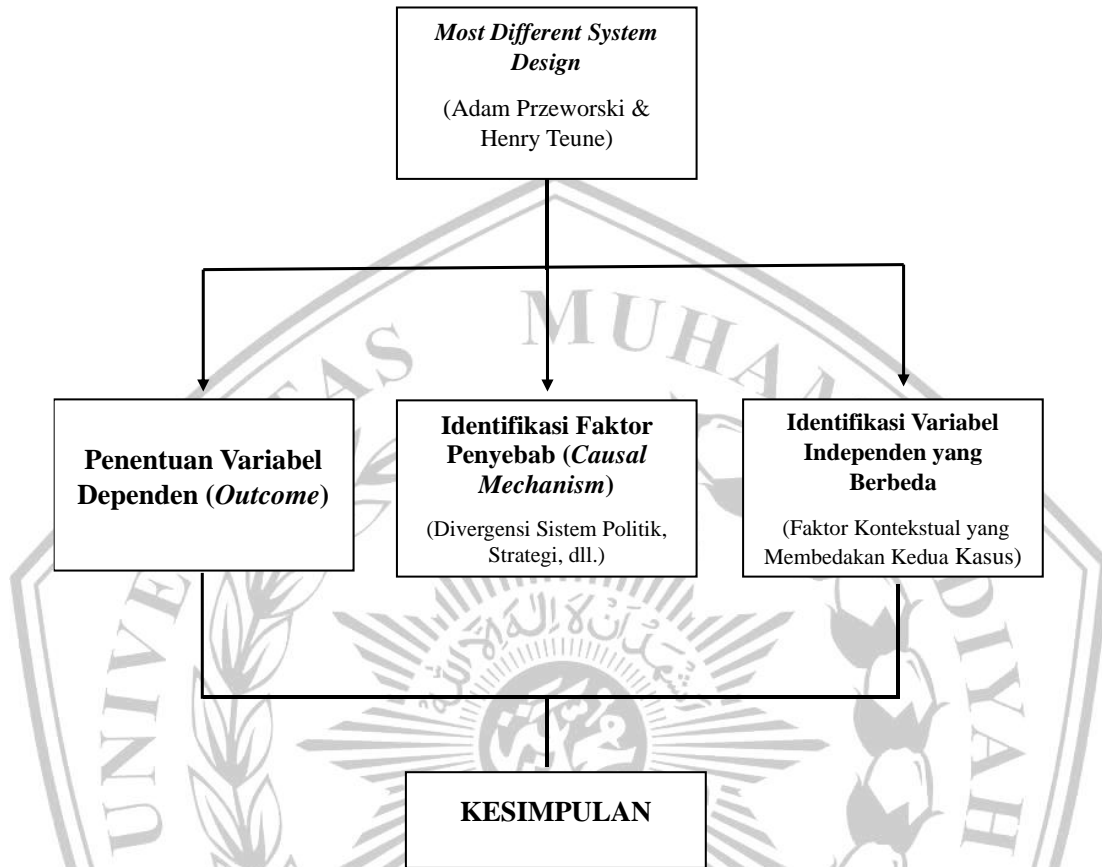
²⁷ Nana S. Sukmadinata, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

kepresidenan Donald Trump dengan Joe Biden terhadap penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan dengan menggunakan metode komparatif *Most Different Systems Design* (MDSD).

Most Different Systems Design memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi titik kesamaan antara kasus yang berbeda dan mengidentifikasi variabel independen yang menyebabkan hasil tersebut. Tugas dari metode komparatif ini adalah untuk menyaring variabel-variabel yang serupa di antara kasus-kasus dan mengisolasi variabel-variabel yang serupa, karena kasus-kasus yang berbeda tersebut sebenarnya dapat menjadi penyebab samanya *outcome* yang dihasilkan oleh sebuah pihak.²⁸

²⁸ Jay Steinmetz, 2019, *Politics, Power, and Purpose: An Orientation to Political Science*, Kansas: Creative Commons Attribution, hal. 178.

Gambar 1.2 Alur Pemikiran *Most Different System Design*



Dalam penelitian ini, MDS digunakan untuk menganalisis perbedaan kebijakan AS dalam menarik pasukan militernya dari Afghanistan di era Presiden Trump tahun 2020 dan Presiden Biden tahun 2021. Meskipun kedua pemerintahan tersebut memiliki konteks internasional, kondisi domestik, dan kondisi ekonomi & militer yang berbeda, kedua presiden tersebut tetap menghasilkan *outcome* yang sama, yaitu menarik pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Untuk memperjelas cara kerja dari MDS ini, penulis akan menjabarkan tiga indikator dari metode implementasi MDS.

1.7.2 Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menganalisa data yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang diungkapkan dalam bentuk tatanan kata.²⁹ Penulis mengumpulkan informasi yang mendukung penelitian ini untuk dijadikan data pendukung akan konsep yang digunakan untuk menjelaskan komparasi faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dengan Joe Biden dari Afganistan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian *library research*, menganalisis sumber-sumber bacaan dari sejumlah literatur, termasuk buku, laporan, artikel, jurnal, berita *online*, dan sejumlah sumber informasi lainnya yang dapat diakses secara *online*.³⁰ Penulis mencoba untuk menjelaskan komparasi faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dengan Joe Biden dari Afganistan.

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.4.1 Batasan Materi

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dalam pembahasannya, peneliti membatasi dengan menjelaskan awal mula terciptanya langkah awal penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari *The Doha Peace Agreement 2020* oleh Presiden

²⁹ Sukmadinata, *Op. Cit.*

³⁰ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1 (2020), Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Donald Trump dan kebijakan Presiden Joe Biden terhadap finalisasi penarikan pasukan militer Amerika Serikat meskipun terdapat eskalasi kekerasan di Afganistan oleh Taliban, dan melakukan analisa komparatif faktor-faktor penarikan pasukan militer pada masa kepresidenan Donald Trump dan Joe Biden dari Afganistan.

1.7.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2017 hingga 2021. Penggunaan tahun 2017 dikarenakan pada tahun tersebut Presiden Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat dan telah melakukan beberapa upaya penarikan pasukan militer dengan menginisiasi perdamaian antara Taliban dan Amerika Serikat di Afganistan. *The Doha Peace Agreement 2020* menjadi salah satu alasan semakin kuatnya pengaruh Taliban di Afganistan. Sedangkan penggunaan tahun 2021 dikarenakan Presiden Joe Biden melakukan finalisasi kebijakannya untuk menarik seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan, menandakan berakhirnya invasi Amerika Serikat di Afganistan.

1.8 Argumen Pokok

Berdasarkan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin, keputusan Amerika Serikat dalam menarik pasukan militernya dari Afganistan dipengaruhi oleh faktor konteks internasional yang bercabang kepada faktor politik domestik dan ekonomi-militer Amerika Serikat. Faktor konteks internasional yang dominan mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah disahkannya sebuah perjanjian yang diinisiasi oleh Donald Trump

dengan Taliban yaitu *Doha Peace Agreement 2020*. Selain konteks internasional, faktor politik domestik juga mempengaruhi kebijakan kedua presiden ini. Kedua presiden memiliki birokrasi atau individu tertentu yang mendukung kebijakannya berdasarkan partainya.

Selanjutnya, faktor ekonomi-militer juga menjadi faktor yang mempengaruhi penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan. Faktor ekonomi yang mempengaruhi adalah fokus Presiden Trump di infrastruksur domestik dan fokus Presiden Biden yang harus menanggulangi *covid-19* untuk masyarakatnya. Kekuatan militer juga dapat dinilai dari jumlah personil dan aliran perdagangan senjata Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode komparatif MDSD, penelitian ini dapat mencari faktor-faktor yang berbeda dari kedua presiden ini yang menyebabkan hasil yang sama, yaitu penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afganistan.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memahami skripsi ini dengan lebih mudah, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

	1.3.1. Tujuan Penelitian
	1.3.2. Manfaat Penelitian
	1.3.2.1 Manfaat Akademis
	1.3.2.2 Manfaat Praktis
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.4.1 Hubungan Amerika Serikat dengan Afganistan bersama Taliban
	1.4.2 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Taliban
	1.4.3 Analisa Pengambilan Kebijakan Luar Negeri
	1.5 Kerangka Teoritis
	1.5.1 Teori Kebijakan Luar Negeri
	1.6 Metode Penelitian
	1.6.1 Tipe Penelitian
	1.6.2 Metode Analisa Data
	1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
	1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
	1.6.4.1 Batasan Materi
	1.6.4.2 Batasan Waktu
	1.7 Argumen Pokok
	1.8 Struktur Kepenulisan

<p>BAB II</p>	<p>LATAR BELAKANG CAMPUR TANGAN NEGARA ADIDAYA DI AFGANISTAN</p> <p>2.1 Riwayat Instabilitas Politik Afganistan</p> <p>2.2 Kemunculan Kelompok Ekstrimis Islam Afganistan</p> <p>2.3 Intervensi Amerika Serikat di Afghanistan</p> <p>2.3.1 Pendanaan Amerika Serikat kepada Mujahideen</p> <p>2.3.2 9/11 dan <i>Global War on Terrorism</i></p> <p>2.3.3 Invasi Amerika Serikat terhadap Afganistan</p>
<p>BAB III</p>	<p>FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT OLEH DUA PRESIDEN YANG BERBEDA</p> <p>3.1 Konteks Internasional Amerika Serikat Era Presiden Trump</p> <p>3.2 Kondisi Domestik Amerika Serikat Era Presiden Trump</p> <p>3.2.1 Kondisi Politik Domestik Amerika Serikat Era Presiden Trump</p> <p>3.2.2 Kondisi Ekonomi dan Militer Amerika Serikat Era Presiden Trump</p> <p>3.3 Konteks Internasional Amerika Serikat Era Presiden Biden</p> <p>3.4 Kondisi Domestik Amerika Serikat Era Presiden Biden</p>

	<p>3.4.1 Kondisi Politik Domestik Amerika Serikat Era Presiden Biden</p> <p>3.4.2 Kondisi Ekonomi dan Militer Amerika Serikat Era Presiden Biden</p>
BAB IV	<p>ANALISA KOMPARATIF DENGAN METODE MOST DIFFERENT SYSTEMS DESIGN</p> <p>4.1 Analisis Variabel Independen: Faktor Pembeda antara Trump dan Biden</p> <p>4.2 Dua Pemimpin, Satu Jejak: Konsekuensi Penarikan Pasukan Militer</p> <p>4.3 Analisis Faktor-Faktor Penarikan Pasukan Amerika Serikat oleh Trump dan Biden</p> <p>4.3.1 Perbedaan Konstelasi Internasional antara Era Trump dan Biden dalam Keputusan Penarikan Pasukan</p> <p>4.3.2 Kompleksitas Politik Domestik dalam Era Trump dan Biden serta Implikasinya terhadap Penarikan Pasukan</p> <p>4.3.3 Perbandingan Kapabilitas Ekonomi dan Militer AS dalam Era Trump dan Biden dalam Kerangka Kebijakan Penarikan Pasukan</p>
BAB V	<p>PENUTUP</p> <p>5.1 Kesimpulan</p>

	5.2 Saran
--	-----------

